

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran. Selain itu dibahas pula mengenai ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi dan penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan.

1.1 Latar Belakang

Wilayah perbatasan saat ini memasuki paradigma baru pengembangan wilayah. Sebagai wilayah yang muncul akibat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Setiap daerah pada dasarnya memiliki potensi dan keterbatasan masing-masing. Keterbatasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang menjangkau seluruh masyarakat berpotensi menyebabkan ketimpangan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik. Tidak jarang masyarakat lebih dekat dan lebih mudah mengakses daerah lain daripada ke ibukotanya sendiri, sehingga berbagai kebutuhan dasarnya seringkali juga terpenuhi dari daerah tetangganya.

Kebutuhan akan kerjasama antar daerah, baru dirasakan oleh pemerintah di era modern ini, maka munculah inisiatif dari daerah perkotaan di Indonesia untuk melaksanakan kerjasama pada daerah yang berbatasan. Pemerintah sangat menyadari akan isu-isu pembangunan yang terjadi di daerah sehingga daerah didorong oleh pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Selain kerja sama daerah dengan daerah lain, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan legalitas bukan lagi menjadi persoalan utama. Sebab dalam undang-undang tersebut, kerjasama daerah disebutkan secara jelas pada Pasal 363 (1-3) bahwa daerah didorong oleh Pemerintah untuk melakukan inovasi

pembangunan yang salah satunya dapat dilakukan melalui kerja sama daerah dengan daerah lain.

Kerjasama daerah dengan daerah lain tentu berkaitan erat dengan konsep pendekatan wilayah, yang mana pembangunan wilayah tidak dapat dilihat secara terpisah (sektoral) saja, melainkan juga perlu memperhatikan keterkaitan dan hubungannya dengan daerah-daerah lain di sekelilingnya. Begitu pun ketika mengidentifikasi potensi serta permasalahan yang ada. Dengan pendekatan wilayah, dimungkinkan terjadinya optimasi potensi yang lebih besar, yakni dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada di sekitar wilayah lain. Dengan demikian, unsur kerja sama daerah menjadi bagian yang penting dalam perspektif pengembangan wilayah.

Keberadaan Kunci Bersama sebagai sebuah forum kerja sama yang terdiri dari 7 kabupaten/kota di Jawa Barat bagian timur dan 2 kabupaten di Jawa Tengah bagian barat memiliki fokus kerja sama untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga mempercepat pembangunan di wilayah kerja sama Kunci Bersama melalui penanganan persoalan bersama dan juga melalui sinergi potensi yang dimiliki. Isu yang mendasari dibentuknya Badan Kerja Sama Antar-Daerah (BKAD) Kunci Bersama ini diantaranya masih rendahnya sarana dan prasarana (infrastruktur) di daerah-daerah perbatasan, seperti aksesibilitas jalan yang masih rendah, sarana kesehatan dan pendidikan yang masih kurang memadai, belum optimalnya kinerja sektor pariwisata, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah.

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang beragam seperti sumberdaya air, lahan dan sumberdaya pendukung yang meliputi infrastruktur wilayah yang memadai, dan sumberdaya manusia yang meliputi ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan berkualitas. Jika di lihat secara geografis provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki wilayah yang sangat strategis dan menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia.

Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki isu pembangunan yang sama di daerah perbatasan. Yakni kesetaraan layanan dasar, kerusakan lingkungan, masalah sosial, infrastuktur publik, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan potensi pariwisata, pemantapan batas daerah, serta pengurangan potensi bencana. Permasalahan di perbatasan menjadi komitmen bersama Pemprov Jabar dan Pemprov Jateng yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait di masing-masing pihak.

Untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan tercapainya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999 : 109). Perkembangan ekonomi suatu wilayah harus di lihat dari sektor- sektor yang menjadi unggulan wilayah tersebut. Sektor unggulan tersebut harus bisa dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat menjadi pemicu pembangunan perekonomian wilayah tersebut. Sektor unggulan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan data PDRB.

Jika dilihat dari PDRB Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah tahun 2017, nilai PDRB terbesar kedua Provinsi tersebut terpadat pada sektor industri pengolahan. Namun, jika dilihat dari kesembilan Kabupaten/Kota di wilayah Kunci Bersama yang memiliki nilai PDRB terbesar dari Sektor Industri Pengolahan yaitu hanya pada Kabupaten Cirebon dan Kabupaen Brebes, dan untuk nilai PDRB ketujuh Kabupaten/Kota lainnya lebih dominan pada sektor pertanian. Ini mengindikasikan kabupaten/kota di daerah perbatasan provinsi ini memiliki nilai sektor ekonomi terbesar diluar potensi unggulan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu sendiri, yang artinya tertinggal dari segi sektor industri pengolahan yang menjadi fokus kegiatan Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk penyumbang nilai PDRB terbesar.

Oleh karena itu dengan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Kunci Bersama diharapkan dapat mengetahui sektor unggulan apa yang dapat dikembangkan dan dapat dituangkan menjadi sebuah

strategi dan arahan kerjasama antar pemerintah Kab/Kota di wilayah Kunci Bersama terkait pengembangan sektor unggulan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka didapati rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Sektor apa yang menjadi unggulan di wilayah Kunci Bersama?
2. Bagaimana strategi kerjasama terkait pengembangan sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama?
3. Bagaimana arahan kerjasama terkait pemanfaatan sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan arahan kerjasama di wilayah Kunci Bersama dalam mendukung pembangunan wilayah dengan memanfaatkan sektor unggulan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Diketahuinya sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama
2. Terumuskannya strategi kerjasama terkait pengembangan sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama
3. Teridentifikasinya arahan kerjasama terkait pemanfaatan sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama

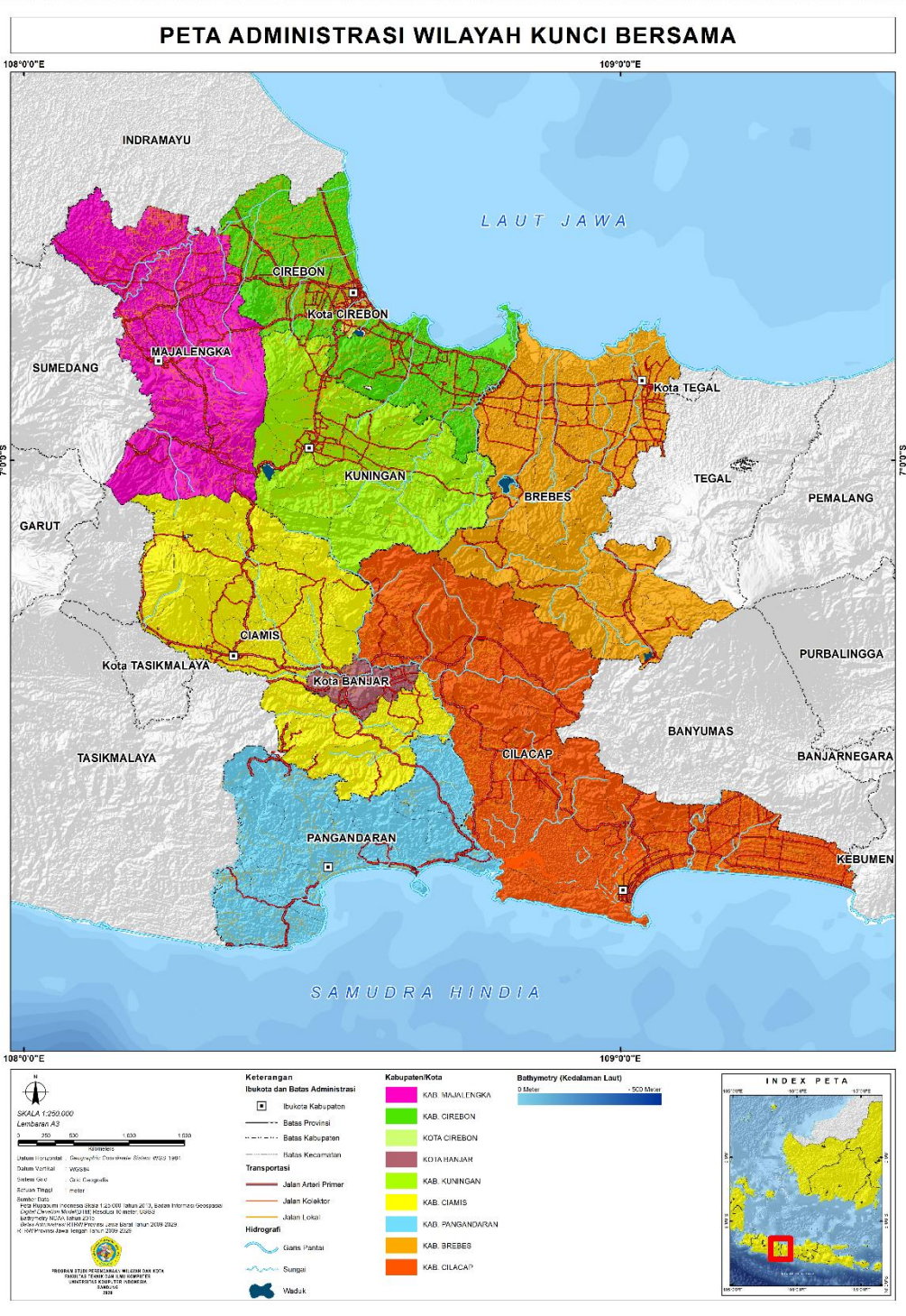
1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sasaran penelitian yang ada, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian, baik dari sisi wilayah maupun materi. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan tepat sasaran. Ruang lingkup penelitian ini mencakupi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang

lingkup wilayah meliputi batasan wilayah yang dijadikan studi, sedangkan ruang lingkup materi berisi hal-hal yang menjadi pokok kajian studi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam kegiatan ini adalah 9 kabupaten/kota, yang terbagi ke dalam 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat bagian timur dan 2 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat. Kesembilan kabupaten/kota tersebut kemudian disingkat menjadi **Kunci Bersama** yang terdiri dari : Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran.



Sumber : BKAD Kunci Bersama, 2019

Gambar I - 1 Peta Administrasi Wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (Wilayah Kunci Bersama)

Tabel I - 1 Kabupaten/Kota di wilayah Kunci Bersama Beserta Batas-batas Wilayahnya

Kabupaten/ Kota	Batas Wilayah			
	Utara	Timur	Selatan	Barat
Kuningan	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Brebes	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap	Kabupaten Majalengka
Ciamis	Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan	Kabupaten Cilacap Kota Banjar	Kabupaten Pangandaran	Kota Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Cirebon	Kabupaten Indramayu Laut Jawa	Kota Cirebon Kabupaten Brebes	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Majalengka
Kota Cirebon	Sungai Kedung Pane	Laut Jawa	Sungai Kalijaga	Sungai Banjir Kanal/ Kabupaten Cirebon
Banjar	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis Kabupaten Cilacap	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis
Brebes	Laut Jawa	Kota Tegal Kabupaten Tegal	Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan
Cilacap	Kabupaten Brebes Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas Kabupaten Kebumen	Samudera Hindia	Kab Ciamis, Kota Banjar Kabupaten Pangandaran
Majalengka	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Cirebon Kabupaten Kuningan	Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis	Kabupaten Sumedang
Pangandaran	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Cilacap	Samudera Hindia	Kabupaten Tasikmalaya

Sumber : BPS, 2018

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi dan arahan kerjasama Pemerintah di Wilayah Kunci Bersama dalam memanfaatkan sektor ekonomi yang menjadi unggulan untuk dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan daerah. Lingkup materi dan juga pendekatan yang digunakan. Lingkup materi yang dimaksud adalah :

- A. Menentukan deliniasi wilayah Kunci Bersama (lingkup kerjasama Kunci Bersama);
- B. Melakukan inventarisasi data dan survei yang dibutuhkan agar dapat menghasilkan potret kondisi masing-masing daerah yang meliputi: (i) Kependudukan (ii) Sosial-Ekonomi (iv) Potensi dan Permasalahan daerah.
- C. Mengidentifikasi sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Kunci Bersama
- D. Merumuskan strategi yang tepat untuk Kabupaten/Kota di wilayah Kunci Bersama dalam mendukung pembangunan wilayah dengan memanfaatkan sektor unggulan
- E. Melakukan analisis dan merumuskan konsep kerja sama
- F. Memberikan rekomendasi strategi dan arahan kerjasama terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, dan metode analisis data. Berikut ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Data dapat dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Berdasarkan perolehannya, data primer didapat melalui survei dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder atau disebut juga sebagai data yang telah ada sebelumnya didapatkan melalui survei ke instansi-instansi dalam tingkat provinsi di Jawa barat dan Jawa Tengah seperti Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dsb. Adapun keseluruhan data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) kependudukan, (3) potensi wilayah, dan (4) hasil wawancara dengan Badan Koordinasi Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, Bappeda dan dinas-dinas yang terkait.

A. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penelusuran di internet, dan survei instansi. Untuk data yang bersifat *accessible* oleh publik, maka data dapat dikumpulkan melalui penelusuran di internet. Sedangkan untuk data-data yang sifatnya *restricted* akan dicari melalui survei instansi ke dinas/badan/lembaga yang relevan di daerah .

B. Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara wawancara atau observasi lapangan. Observasi lapangan bertujuan untuk menggali dan memahami kondisi eksisting wilayah yang ada. Sedangkan instrumen survei yang digunakan dapat berupa lembar wawancara atau kamera.

1.5.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.

Tabel I - 2 Metode Analisis Data

Tujuan	Alat Analisis	Jenis Data	Sumber Data
1. Mengidentifikasi sektor unggulan daerah	<i>Location Quotient</i> (LQ)	PDRB kabupaten dan provinsi	BPS kabupaten dan provinsi
2. Mengidentifikasi strategi dan kerjasama terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama	Kualitatif (SWOT)	Hasil wawancara dengan Sekretariat Kunci Bersama, RPJMD, RTRW Provinsi dan Kab/Kota	BKAD Kunci Bersama
3. Mengidentifikasi arahan kerjasama terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama	Kualitatif	Hasil wawancara dengan Sekretariat Kunci Bersama	BKAD Kunci Bersama

Berdasarkan Tabel I-2 di atas, untuk menentukan sektor unggulan daerah dapat menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Untuk menentukan strategi

dalam memanfaatkan sektor unggulan, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Keseluruhan data yang digunakan adalah data PDRB kabupaten dan provinsi serta data kualitatif hasil wawancara dengan *Stake Holder terkait*. Kemudian hasil analisis SWOT tersebut digunakan untuk menentukan strategi dan arahan kerjasama terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama.

A. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Analisis yang dimaksud adalah deskripsi daerah penelitian, deskripsi tentang implikasi terhadap strategi kebijakan pembangunan wilayah dengan sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut, misalkan kegiatan ekonomi wilayah. Selain itu analisis kualitatif dapat berupa keadaan umum wilayah seperti pemerintahan, jumlah penduduk, tenaga kerja, potensi ekonomi, sistem sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

B. Analisis Kuantitatif

Penggunaan metode kuantitatif bertujuan untuk menghitung beberapa hal yang terkait dengan tujuan penelitian, dalam melakukan perhitungan tersebut digunakan beberapa asumsi dasar. Asumsi yang berkaitan dengan pembangunan wilayah adalah kegiatan perekonomian wilayah Kabupaten/kota bersifat homogen.

C. Location Quotient

Langkah awal dari metode ini adalah dengan cara membagi kegiatan ekonomi suatu wilayah ke dalam dua bagian, yaitu sektor basis dan bukan sektor basis. Metode Location Quotient merupakan suatu metode yang dapat membantu dalam menunjukkan (keunggulan) ekspor perekonomian suatu daerah atau derajat *self sufficiency* pada suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan:

1. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan di wilayah sendiri maupun di daerah luar yang bersangkutan.

2. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan hanya di daerah tersebut dan bahkan belum mencukupi wilayahnya, sehingga dibutuhkan bantuan dari daerah atau sektor lainnya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk perhitungan LQ adalah data PDRB berdasarkan harga berlaku. Metode LQ ini juga merupakan perbandingan antara pendapatan relatif suatu sektor dalam suatu daerah dengan total pendapatan relatif sektor tertentu pada tingkat daerah yang lebih luas. LQ juga efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. Untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis perekonomian adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Tiebout 1966, dalam Budiharsono).

$$LQ = \frac{Si/Ni}{S/N} = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

LQ = Besarnya kuosien lokasi suatu sektor ekonomi

Si = Jumlah pendapatan sektor i pada tingkat kabupaten (wilayah bawah)

S = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian ditingkat kabupaten

Ni = Jumlah pendapatan sektor i pada wilayah provinsi (wilayah atas)

N = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian pada tingkat provinsi.

Hasil dari perhitungan LQ apabila menunjukkan $LQ > 1$, maka sektor tersebut termasuk sektor basis, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan bagi perekonomian di wilayahnya dan sektor tersebut lebih berorientasi pada ekspor. Sebaliknya jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut termasuk sektor non basis, artinya sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sehingga diperlukan tambahan dari sektor atau daerah lainnya. Sektor non basis juga bisa digolongkan ke dalam sektor yang berorientasi pada impor.

Terdapat dua asumsi utama yang digunakan dalam metode LQ adalah:

1. Pola konsumsi rumah tangga di wilayah bawah identik (sama dengan) pola konsumsi rumah tangga di wilayah atasnya.
2. Baik wilayah atas maupun wilayah bawah mempunyai fungsi produksi yang linier dengan produktivitas di setiap sektor yang sama besarnya.

D. SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis. Analisis SWOT dilaksanakan dengan memfokuskan pada dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan intern. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Perce dan Robinson dalam Yuleyane, 2003).

Unsur-unsur SWOT meliputi S (strength) yang berarti mengacu kepada keunggulan kompetitif dan kompetensi lainnya, W (weakness) yaitu hambatan yang membatasi pilihan-pilihan pada pengembangan strategi, O (opportunity) yakni menyediakan kondisi yang menguntungkan atau peluang yang membatasi penghalang dan T (threat) yang berhubungan dengan kondisi yang dapat menghalangi atau ancaman dalam mencapai tujuan. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T.

Terdapat delapan tahap dalam membentuk matriks SWOT, yaitu:

1. Membuat daftar kekuatan kunci internal wilayah.
2. Membuat daftar kelemahan kunci internal wilayah.
3. Membuat daftar peluang eksternal wilayah.
4. Membuat daftar ancaman eksternal wilayah.
5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-O.
6. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-O.

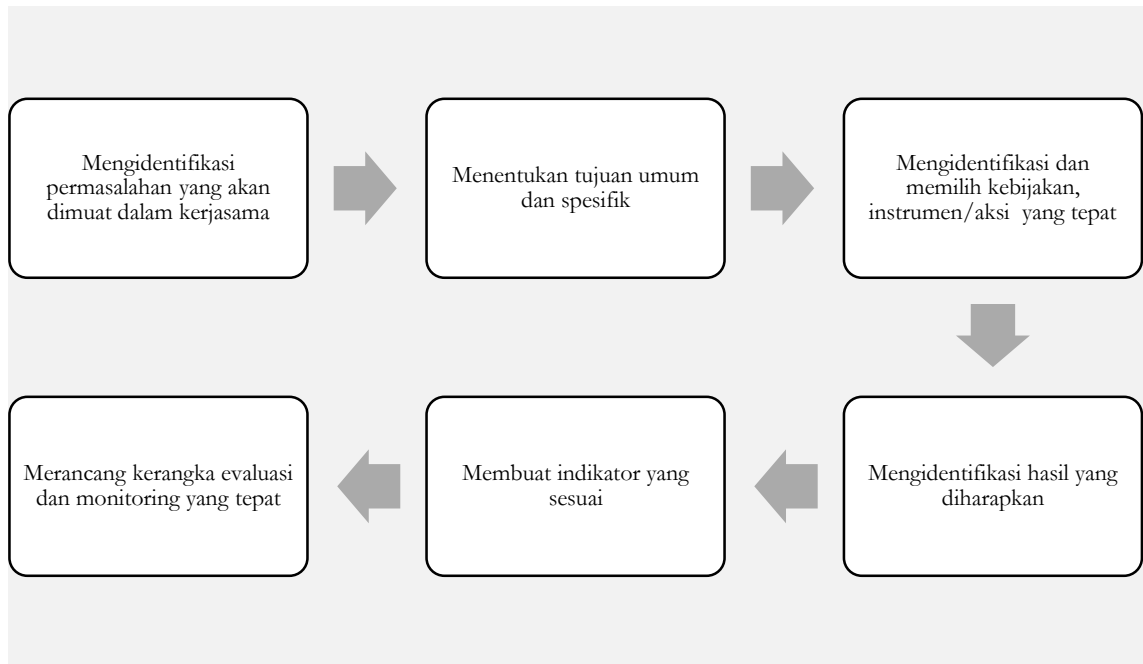
7. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-T.
8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-T.

Internal Eksternal	STRENGTH (S) Daftar Kekuatan Internal	WEAKNESS (W) Daftar Kelemahan Internal
OPPORTUNITIES (O) Daftar Peluang Eksternal	STRATEGI S-O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
THREATS (T) Daftar Ancaman Eksternal	STRATEGI S-T Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	STRATEGI W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar I - 2 Matriks SWOT

E. Langkah analitis dalam kerja sama

Secara garis besar, kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui 6 tahapan. Pertama, mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan yang sama-sama dihadapi. Kedua, menentukan tujuan bersama. Ketiga, melakukan identifikasi dan memilih kebijakan serta aksi yang tepat. Keempat, menentukan target sasaran yang diharapkan. Kelima, menentukan indikator yang sesuai dan terukur. Keenam, merancang kerangka evaluasi (*evaluation framework*) dan monitoring yang tepat

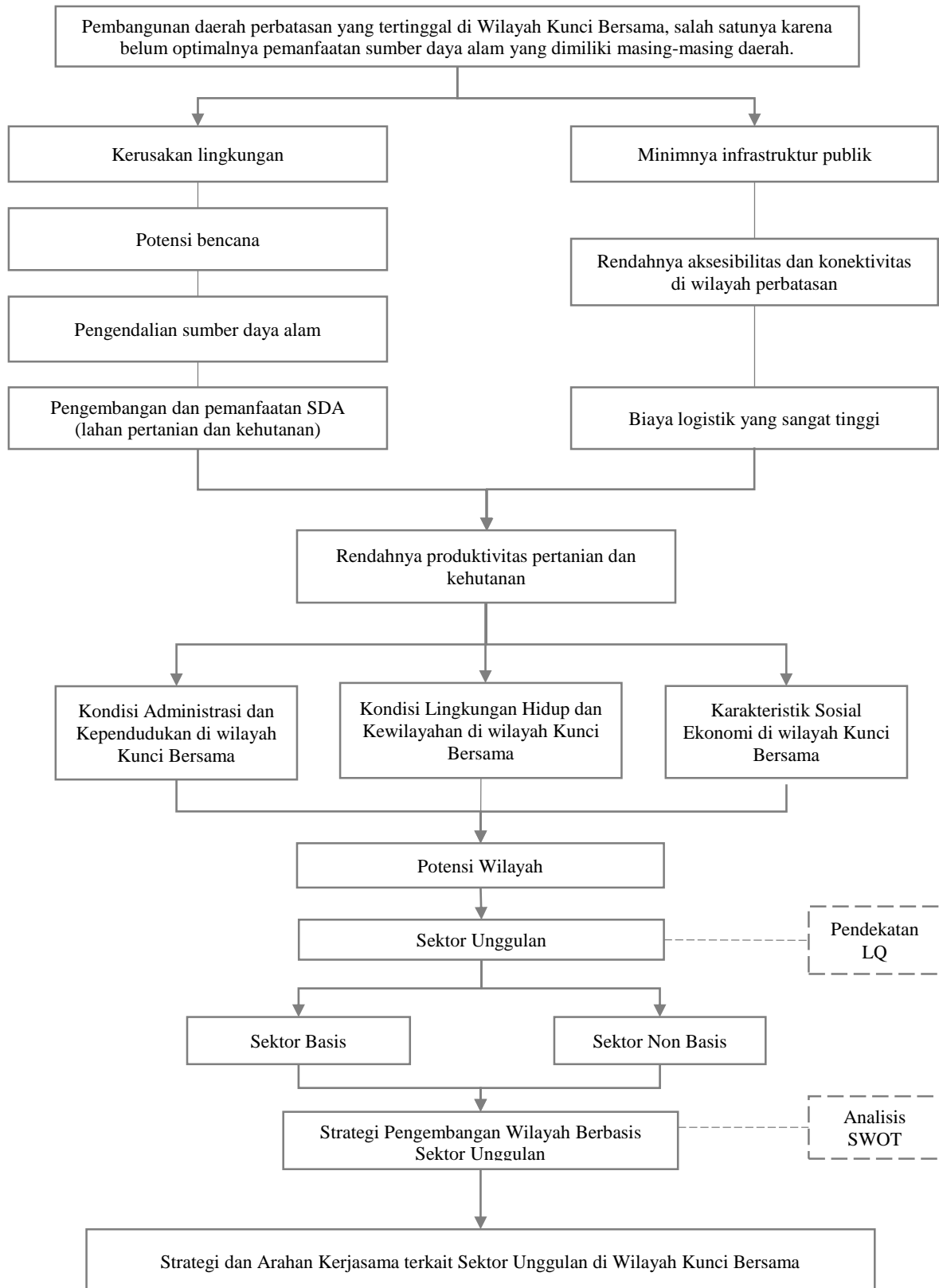


Sumber: *City-To-City Cooperation Toolkit, 2015*

Gambar I - 3 Langkah-Langkah Analitis dalam Kerjasama

1.6 Kerangka Pemikiran

Tahapan penelitian identifikasi strategi dan arahan terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama, dapat dilihat pada **Gambar 1-4**.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar I - 4 Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi laporan ini, maka sub bab ini menjelaskan tentang sistematika pembahasan, seperti pada uraian dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara khusus mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang berisi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi pengelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai kajian teoritis yang menjelaskan tentang definisi dari pembangunan wilayah, pembangunan ekonomi daerah, sektor unggulan dan kriteria sektor unggulan, teori basis ekonomi, *Location Quotient* (LQ), kerjasama antar daerah, kategori dan bentuk kerjasama daerah, serta pelaksanaan kerjasama daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian seperti administrasi dan kependudukan, social ekonomi, infrastruktur, serta lingkungan hidaup dan kewilayahan.

BAB IV ANALISIS STRATEGI DAN ARAHAN KERJASAMA TERKAIT SEKTOR UNGGULAN DI WILAYAH KUNCI BERSAMA

Menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan perencanaan yang digunakan dalam analisis, tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi strategi dan arahan kerjasama terkait sektor unggulan di wilayah Kunci Bersama.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi, keterbatasan studi, dan saran studi lanjutan.